

## Visi dan Misi

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2013-2018; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih untuk masa bakti 2018-2023; mengikuti prioritas pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025; memperhatikan prioritas pembangunan nasional; merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; serta memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan, maka visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 adalah: SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA. Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2018-2023 sebagai berikut: Sumsel maju untuk Semua adalah keadaan dimana terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan dan pembangunan maritim yang merata dan berkeadilan, dimana hasil-hasil pembangunannya dinikmati seluruh anggota masyarakat. Sumsel Maju untuk Semua adalah kondisi dimana meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, integritas, dan kearifan lokal, di samping terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dengan dukungan anggaran pro-rakyat, pro-lingkungan, dan pro-gender yang transparan dan akuntabel. Sumsel Maju untuk Semua adalah kondisi tercapainya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sumsel Maju untuk Semua adalah terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi kehidupan masyarakat sehingga anggota masyarakat dapat menjalankan aktivitas keagamaan, terciptanya kehidupan masyarakat yang menghargai perbedaan, dan masyarakat dapat menikmati kesenian yang bermutu di pusat-pusat kebudayaan. Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

### **Misi 1:**

Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan.

### **Misi 2:**

Meningkatkan kualitas SDM, baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas.

### **Misi 3:**

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.

### **Misi 4:**

Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.

**Misi 5:**

Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, dan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang, bertanggung-jawab dalam pengkoordinasian proses penelitian dan pengembangan pembangunan daerah Prov. Sumsel, Balitbangd turut bertanggungjawab dalam mewujudkan Kelima misi pembangunan tersebut. Disamping itu, eksistensi Balitbangda sebagai salah satu OPD pendukung kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, merupakan bagian integral diantara beberapa OPD yang mendukung terealisasinya misi ketiga, yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif memiliki tolak ukur indeks reformasi birokrasi, yang mana sarannya adalah tata kelola pemerintahan yang meningkat. Peningkatan ini ditandai dengan meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja pemerintah dan opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang wajar tanpa pengecualian. Dalam konteks ini maka peningkatan kualitas kinerja penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi daerah merupakan faktor kunci tercapainya misi tersebut. Balitbangda berperan penting dalam pencapaian setiap misi yang ingin dicapai ditingkat daerah dalam lima tahun kedepan.

Pada Misi pertama, yaitu Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan, yaitu dengan sasaran Maju ekonomi kerakyatan (meningkatkan ekonomi kerakyatan) 2. Maju Investasi, Industri, dan Perdagangan (Meningkatnya Investasi, Industri, dan Perdagangan) 3. Maju Pertanian Rakyat dan Kedaulatan Pangan (Meningkatnya produksi/produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kedaulatan pangan) 4. Maju Kesejahteraan Masyarakat (Menurunnya Jumlah Orang Miskin dan Desa Tertinggal) 5. Maju Akses Energi (Meningkatnya akses energi).

Untuk Sasaran Maju ekonomi kerakyatan (meningkatkan ekonomi kerakyatan) ditempuh dengan strategi ;

- 1) Menggali sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui sektor pariwisata dan industri pengolahan;
- 2) Mempercepat berfungsinya KEK di Sumatera Selatan;
- 3) Meningkatkan kerjasama unsur Akademisi, Bisnis, Government, Legislatif;
- 4) Meningkatkan kualitas belanja pemerintah untuk pembangunan;
- 5) Mengoptimalkan ekonomi produktif berbasis kearifan lokal;
- 6) Mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah yang didukung oleh sumber daya manusia agar dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing yang lebih baik;
- 7) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif di sektor jasa dan IKM;
- 8) Meningkatkan kerjasama program technopreneurship;
- 9) Mengoptimalkan Pusat Distribusi Regional (PDR);

- 10) Meningkatkan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Untuk Sasaran Maju Investasi, Industri, dan Perdagangan (Meningkatnya Investasi, Industri, dan Perdagangan) ditempuh dengan strategi:
- Mengoptimalkan proses perizinan untuk investasi;
  - Menciptakan peluang investasi agar dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya dan tingkat pendapatan pekerja lebih besar dan lebih merata;
  - Mengembangkan industri pengolahan (manufaktur) untuk hilirisasi SDA unggulan dengan memprioritaskan penggunaan sebesar-besarnya tenaga kerja lokal dan pemanfaatan sumber daya alam (resources)/ bahan baku lokal;
  - Memperkuat daya saing ekspor dan mengendalikan impor untuk meningkatkan neraca perdagangan;
  - Revitalisasi pasar tradisional menuju pasar tradisional modern (PTM);
  - Meningkatkan daya saing produk IKM;
  - Mendorong kondisi yang kondusif bagi investasi;
  - Mendorong tersedianya infrastruktur untuk mendukung iklim investasi;
  - Meningkatkan kualitas SDM IKM;
  - Memfasilitasi standisasi industri;
  - Mendorong percepatan beroperasinya KEK Tanjung Api-Api dan Kawasan Industri lainnya.

Untuk Sasaran ketiga terakhir, yaitu Maju Pertanian Rakyat dan Kedaulatan Pangan (Meningkatnya produksi/produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kedaulatan pangan) dilakukan melalui strategi: 1) Mengembangkan kawasan komoditas/ sektor unggulan berbasis potensi sumber daya lokal dan memperpendek rantai pasar; 2) Meningkatkan Pembinaan Pemanfaatan Kawasan Hutan; 3) Monitoring dan Evaluasi Peredaran Hasil Hutan; 4) Riset berbasis kebutuhan; 5) Peningkatan publikasi hasil litbang dan inovasi; 6) Meningkatkan kualitas SDM Peneliti; 7) Melakukan koordinasi dengan pembuat kebijakan dan pelakubisnis; 8) Meningkatkan Fungsi Intermediator Teknologi; 9) Inventarisasi permasalahan yang membutuhkan litbang dan inovasi; 10) Mengupayakan pelelangan ikan di pelabuhan perikanan dapat dilaksanakan agar nilai jual nelayan lebih tinggi; 11) Meningkatkan akses petani terhadap saprodi berkualitas dan terjangkau; 12) Meningkatkan Kinerja Jaringan Irigasi Permukaan dan Irigasi Rawa; 13) Menjamin ketersediaan air di lahan irigasi dan non irigasi; 14) Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan prasarana di dalam dan keluar sentra produksi komoditi pangan; 15) Mencetak sawah baru untuk meningkatkan produksi padi dalam rangka meningkatkan Sumsel Lumbung Pangan; 16) Peningkatan Kesehatan Ternak Terhadap Serangan Penyakit; 17) Pemantapan Ketersediaan Pangan, Kelembagaan Distribusi Pangan; 18) Masyarakat dan Gerakan Diversifikasi Konsumsi Pangan dan Pengawasan Keamanan Mutu Pangan Segar; 19) Melakukan Peremajaan Tanaman Yang Sudah Tua atau kurang produktif, intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan saranapanen, peningkatan kemampuan SDM petani dalam Budidaya Tanaman, penanggulangan OPT, meningkatkan harga jual komoditas. Untuk Sasaran Maju Kesejahteraan Masyarakat (Menurunnya Jumlah Orang Miskin dan Desa Tertinggal) dilakukan dengan strategi peningkatan perlindungan dan jaminan social, peningkatan advokasi dan rehabilitasi social, dan peningkatan data, informasi dan pemberdayaan social. Dan sasaran terakhir Maju Akses Energi (Meningkatnya akses energi) dapat

dilakukan strategi; Dalam hal pencapaian misi pertama, sub bidang Subbidang Pemberdayaan Masyarakat di bawah bidang Sosial dan Kependudukan dan sub bidang Ekonomi dibawah bidang Bidang Ekonomi Dan Pembangunan mengemban amanah untuk berkoordinasi dengan OPD yang membidangi urusan mengatasi pengangguran dan kemiskinan.

Dari uraian diatas dapat ditelaah beberapa permasalahan yang dihadapi Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan Visi dan Misi Kepala Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih, antara lain :

- 1) Keterbatasan data dan informasi dari instansi terkait sebagai data pendukung penelitian/kajian.
- 2) Belum memadainya jumlah SDM serta kompetensi/fungsional peneliti.
- 3) Masih terdapatnya proporsi bidang tugas yang tumpang tindih antara fungsi utama dengan fungsi penunjang maupun fungsi tambahan.

### **Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

**Visi** Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia Tahun 2014–2019 adalah “Iptek Untuk Kesejahteraan dan Kemajuan Peradaban”.

Upaya untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai,berikut:

- 1) Meningkatkan penelitian, pengembangan dan pendayagunaan Iptek sebagai basis dalam membangun daya saing, kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional serta mencapai kemajuan peradaban bangsa.
- 2) Memperkuat daya dukung iptek untuk mempercepat pencapaian tujuan Negara, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan,kehidupan bangsa; serta turut serta menjaga ketertiban dunia.

Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2014-2019 memberikan gambaran mengenai pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) sebagai“engineoftomorrow” yang mempunyai peran penting bagi pencapaian kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan Iptek nasional seharusnya sudah berorientasi pada pemenuhan kebutuhan riil masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan peradaban.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut,diperlukan sebuah system yang memungkinkan terjadinya proses inovasi secara menyeluruh, yaitu system yang tidak hanya dapat memperkuat proses pengembangan Iptek,tetapi juga dapat menjembatani dan mengarahkan agar hasil-hasil pengembangan Iptek ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkannya. Oleh sebab itu, maka program pembangunan Iptek kedepan diarahkan untuk mewujudkan sebuah Sistem Inovasi Nasional (SINas) yang berbasiskan kepada Sistem Nasional Iptek (SisnasIptek).

Sistem Inovasi Nasional adalah sebuah jaringan rantai pemasok teknologi (technology supplychain) yang mengaitkan antara institusi publik Pemasok teknologi dan sector swasta pengguna teknologi dalam Suatu wilayah nasional (SINas) atau daerah (SIDa) yang berinteraksi secara koheren dalam lingkup kegiatan memproduksi pengetahuan, menerapkan dan mendiseminasikan hasilnya, sehingga menumbuhkan manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

SINas dikembangkan dalam rangka menjembatani antara sisi kebutuhan iptek dalam masyarakat dengan stakeholders yang menawarkan berbagai kreatifitas dan inovasi pengembangan iptek yang selama ini sering dianggap menjadi missinglink dalam penerapan iptek. Penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas) yang meliputi aspek kelembagaan, sumberdaya dan jaringan, yang berfungsi sebagai wahana pembangunan iptek menuju visi pembangunan Iptek dalam jangka panjang.

Dalam pengembangan iptek, pemerintah daerah berperan aktif dalam Penguatan sistem inovasi melalui pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah. Hasil pengembangan SIDa diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

Institusi penelitian, baik di tingkat pusat maupun daerah bertanggung jawab untuk menghasilkan dokumen penelitian pembangunan berdasarkan proses penelitian sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Penelitian Pembangunan Nasional. Penelitian dimaksud dimulai dari daerah hingga tingkat nasional, yang melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders). Dalam rangka mengintegrasikan, memadukan, dan mensinergikan penelitian antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi serta mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara penelitian, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat; serta menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasar hal tersebut, maka penentuan visi, misi, kebijakan, tujuan dan sasaran institusi penelitian pembangunan harus selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan, sebagai institusi penelitian di daerah, menyusun program dan kegiatan sebagai penjabaran dari visi dan misi yang selaras dengan program dan kegiatan Balitbang Depdagri, sebagai institusi penelitian di tingkat pusat.